

Implementasi Pendidikan Agama & Pendidikan Karakter



Edy Riyanto, M.Pd | Markus Oci, M.Pd.K | Erni Setianingrum, M.Pd | Zuyyinah, S.Pd.SD |
Milma Yasmi, M.Pd | Mukhaelani, S.Pd., M.Pd.I | Dody Dadang Firmansyah, S.Pd., M.Pd.,
C.T | Febry Fahreza, M.Pd | Dr.Talizaro Tafonao, S.Th., M.Pd.K | Wa Ode Darniati, S.Pd |
Dicky Dominggus, M.Th | Dr. H. Anis Fauzi, M.Si | Emiwati, S.Pd
Iwan Ridwan, S.Pd.I., M.Pd.I | Dr. Abdul Rahman H., M.T, C.T
Editor : Abdul Rosid

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KARAKTER

Penulis :

Edy Riyanto, M.Pd
Markus Oci, M.Pd.K
Erni Setianingrum, M.Pd
Zuyyinah, S.Pd.SD
Milma Yasmi, M.Pd
Mukhaelani, S.Pd., M.Pd.I
Dody Dadang Firmansyah, S.Pd., M.Pd., C.T
Febry Fahreza, M.Pd
Dr. Talizaro Tafonao, S.Th., M.Pd.K
Wa Ode Darniati, S.Pd
Dicky Domingus, M.Th
Dr. H. Anis Fauzi, M.Si
Emiwati, S.Pd
Iwan Ridwan, S.Pd.I., M.Pd.I
Dr. Abdul Rahman H., M.T, C.T

Anggota Komunitas Pencinta Buku Indonesia Maju



Implementasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter

Penulis : Edy Riyanto, M.Pd dkk
ISBN : 978-623-7463-47-4
Penyelia : Dema Tesniyadi, M.Pd
Editor : Abdul Rosid
Desain Sampul : Denta Rafly Musadad
Layout : Pitriyani

Cetakan Pertama, Oktober 2019
v + 115 hlm. ; 14.8 x 21 cm

Penerbit

Media Edukasi Indonesia (Anggota IKAPI)
Jalan Lingkar Caringin Cisoka Tangerang
Banten Kode Pos 15730
Email: indonesiamediaedukasi@gmail.com
WhatsApp Only: 087871944890

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun
juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Implementasi Karakter Building Di Era Milenial pada Peserta Didik	1
Kreativitas Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Agama Kristen	25
Membangun Karakter Generasi Mileniial	54
Prinsip Dasar Mendidik Anak Menurut Alqur'an	70
Merawat Karakter Melalui Pembelajaran di Kelas	95
Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar	147
Peran Sastra Daerah (Cerita Rakyat) dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik	180
Peranan Karakter Dalam Pengabdian Abdi dalem Keraton Yogyakarta	190
Keteladanan Beribadah Pondasi Pembangunan Karakter	218
Sejarah dan Kontribusi Majelis Ta'lim dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia	218
Pentingnya Pendidikan Usia Lanjut	291
Peranan Shalat Dhuha dalam Membangun Karakter Siswa	311

PENTINGNYA PENDIDIKAN USIA LANJUT

Oleh:

Anis Fauzi

Jantera_Anis@ yahoo.com

Secara historis, Alhamdulillah, bangsa kita sudah merdeka sejak 74 tahun yang lalu, hasilnya sudah dan sedang kita rasakan bersama. Ada yang menggembirakan dan tentu masih ada hal-hal yang kurang menggembirakan. Hal-hal yang menggembirakan diantaranya persebaran lembaga pendidikan dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas, bahkan perguruan tinggi (Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003) sekalipun sudah hadir di sebagian besar daerah otonomi kabupaten/kota di Indonesia. Dalam kasus tertentu, kehadiran lembaga pendidikan tersebut malah sudah menyentuh wilayah kecamatan. Termasuk didalamnya persebaran lembaga pendidikan pra-sekolah, yakni taman kanak-kanak dan sejenisnya serta pendidikan anak usia dini. Kedua lembaga pendidikan pra-sekolah tersebut sudah ikut mewarnai fenomena pendidikan di

Indonesia. Keseluruhan fenomena pendidikan tersebut masih tergolong langka untuk wilayah kabupaten/kota bila kita menggambarkan situasi Indonesia pada era 74 tahun yang lalu.

Akibatnya adalah masih ada manusia Indonesia yang kini berusia 74 tahun yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal dari semua jenjang pendidikan, sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sekalipun demikian, mungkin mereka masih bisa bersyukur tatkala ada anak-anak ataupun cucu-cucu mereka yang justru bisa menikmati indahnya hasil proses pendidikan formal sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, termasuk pendidikan pra-sekolah. Dalam konteks proses edukatif, bagaimana tingkah laku manusia Indonesia yang kini berusia 74 tahun lebih yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal tersebut? Penulis khawatir akan nasib mereka, yang mungkin menjadi bahan tertawaan anak-anak dan cucu-cucunya sendiri atau bahkan menjadi manusia *terasingkan* oleh gemerlap kehidupan anak-anak dan cucu-cucunya. Mereka tidak leluasa untuk mencicipi, menikmati, dan merasakan dengan *enjoy* fasilitas hidup

yang tersedia atau yang disediakan oleh anak-anak dan cucu-cucu mereka. Subhanallah !

Secara *history of edukatif*, pemerintah pernah memberlakukan ujian negara pada level sekolah dasar di era tahun 1960-an. Tetapi tidak semua sekolah dasar menyelenggarakan ujian negara, sehingga sebagian siswa kelas enam harus mengikuti ujian negara di sekolah dasar induk (*Forfolk*) dengan jarak lebih dari 5 kilo meter perjalanan dari rumah dengan berjalan kaki. Akibatnya banyak orang tua yang *tidak mengizinkan* anak-anaknya ikut ujian akhir sekolah dasar. Jadilah peserta didik tersebut tidak memiliki ijazah sekolah formal sampai sekarang.

Pemerintah Republik Indonesia juga sempat membuat proyek pembangunan Sekolah Dasar Inpres sekitar tahun 1972 sampai tahun 1975. Pada saat itu, banyak dibangun gedung sekolah dasar di berbagai wilayah pedesaan seiring dengan kampanye program keluarga berencana dengan semboyan jitu *Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera* dengan cukup punya anak *dua* saja. Permasalahannya, ada faktor budaya lokal yang menghambat masyarakat, terutama penduduk usia sekolah

dasar (7 sampai dengan 10 tahun), menjadikan mereka tidak sempat mengenyam pendidikan di SD Inpres tersebut dan berlanjut pada level pendidikan berikutnya sampai sekarang. Faktor budaya yang dimaksud adalah banyak orang tua yang *belum bisa mengizinkan* anak-anaknya mengenyam pendidikan di lembaga sekolah dasar, karena ada kesan bahwa pola pendidikan di sekolah dasar beraroma penjajah kolonial.

Akibatnya, penduduk Indonesia yang saat itu (tahun 1972) berusia 7 hingga 10 tahun, jika sampai sekarang masih berumur panjang, usia mereka kini (2019) sudah mencapai lebih dari 57 tahun dan sedang memasuki masa usia lanjut. Bagaimana dengan tingkah laku mereka sehari-hari, terutama dalam berinteraksi *sosial edukatif* dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka? Penulis yakin akan ada hambatan kultural dan sosiologis tertentu diantara mereka yang perlu kita renungkan bersama.

A. Calon Peserta Didik Usia Lanjut

Secara sederhana, calon peserta didik usia lanjut adalah seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 55 tahun, berdasarkan batas **usia pensiun** di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau 60 tahun, jika didasarkan atas usia pensiun yang berlaku bagi profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di lingkungan Kementerian Agama. Dengan batasan usia pensiun tersebut, penulis yakin bahwa sangat banyak penduduk Indonesia yang termasuk kategori manusia usia lanjut, yang perlu diperhatikan proses pendidikannya menuju masa tua yang bahagia dan sejahtera.

Adapun batas usia pensiun pegawai berstatus PNS atau Aparatur Sipil Negara (Menurut UU Nomor 30 Tahun 2019 tentang Aparat Sipil Negara) antara lain:

No	Nama Jabatan/ Golongan	Batas Usia Pensiun (BUP)	Dasar Hukum
1	PNS Umum	56	Pasal 3 ayat 2 PP No. 32 Th 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang diubah menjadi PP No. 65 tahun 2008
2	Ahli Peneliti dan Peneliti	65	Pasal 1 PP No. 65 tahun 2008
3	Guru Besar/ Professor	65	Pasal 67 ayat 5 UU No.4 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4	Dosen	65	
5	Guru	60	Pasal 40 ayat 4 UU No.4 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

6	POLRI	58	Pasal 30 ayat 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
7	POLRI dengan keahlian khusus	60	
8	Perwira TNI	58	Pasal 75 UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
9	Bintara dan Tantara	53	
10	Jaksa	62	Pasal 12 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
11	Eselon I dalam jabatan Struktural	60	Pasal 1 PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas PP No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian
12	Eselon II dalam	60	

	jabatan Struktural		Pegawai Negeri Sipil
13	Eselon I dlm jabatan strategis	62	
14	Pengawas Sekolah	60	Pasal 1 PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas PP No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
15	Hakim Mahkamah Pelayaran	58	
16	Jabatan lain yang ditentukan Presiden	58	
17	Pekerja/ Buruh	Berdasarkan PK, PP, PKB	Pasal 154 UU No. 13 tentang Tenaga Kerja

Bila klasifikasi manusia usia lanjut tersebut berdasarkan kualifikasi pendidikannya, agar sinkron dengan program Wajib Belajar Sembilan Tahun, maka hanya mereka yang belum sempat mengenyam pendidikan hingga level sekolah menengah tingkat pertama saja yang seharusnya diikutsertakan dalam program pendidikan manusia usia lanjut. Dengan demikian, sekalipun penduduk Indonesia sudah berusia di atas 55 tahun. Namun apabila telah mengenyam proses pendidikan pada level sekolah menengah tingkat pertama (SMP, MTs atau yang sederajat), maka tidak perlu ikut serta dalam program pendidikan manusia usia lanjut. Mereka dianggap sudah memiliki bekal ilmu pengetahuan dan kepribadian yang cukup untuk menghadapi proses kehidupan di masa tua mereka bersama anak-anak dan cucu-cucu mereka.

Bila klasifikasi manusia usia lanjut didasarkan atas pendekatan sosial ekonomis, yakni kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari pada usia lanjut atas dasar hasil usahanya sendiri, maka diduga jumlahnya akan *membengkak*. Dengan alasan, banyak manusia usia lanjut yang tidak memiliki mata pencaharian yang tetap dan juga

tidak memiliki *skill* yang jelas untuk mendapatkan penghasilan yang layak bagi dirinya dan keluarganya.

Seandainya kita prediksi jumlah manusia usia lanjut di Indonesia mencapai 32 juta, dan setiap provinsi memiliki satu juta manusia usia lanjut. Kemudian secara rata-rata pada setiap wilayah otonomi kabupaten/kota terdapat sepuluh ribu manusia usia lanjut. Jumlah tersebut akan mengecil manakala kita menghitung jumlah manusia usia lanjut pada wilayah kecamatan, katakanlah jumlahnya ada 500 orang. Dengan demikian, hendaknya pemerintah daerah otonomi kabupaten/kota segera membangun lembaga pendidikan khusus manusia usia lanjut pada setiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia, dengan prediksi satu sekolah akan dihuni oleh minimal 100 manusia usia lanjut yang bersedia/berminat. Mencengangkan kan !

B. Calon Guru (untuk) Pendidikan Usia Lanjut .

Lantas siapa sih yang akan menjadi guru di lembaga pendidikan khusus manusia usia lanjut itu? Konsep guru kan terfokus kepada orang yang memiliki pengetahuan dan kepribadian lebih unggul daripada peserta didiknya,

sekalipun usia biologisnya justru lebih muda dibandingkan dengan usia biologis peserta didiknya. Lihat saja di beberapa lembaga kursus komputer maupun kursus Bahasa Inggris, tampak jelas bahwa sang guru di lembaga kursus tersebut banyak yang berusia lebih muda dibandingkan dengan usia peserta didiknya. Toh kegiatan proses pembelajaran mereka di tempat kursus tersebut tetap berjalan lancar dan hasilnya sukses. Demikian pula diharapkan yang akan terjadi di lembaga pendidikan khusus manusia usia lanjut. Faktor guru ini jangan dilihat dari usia biologisnya, tapi lihatlah dari pemahaman teoritis dan mentalitas edukatifnya yang elegan, kreatif dan unggul.

Secara kurikuler, memang akan lebih baik rekrutmen guru di lembaga pendidikan khusus manusia usia lanjut itu dari alumni jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang jumlahnya sudah mencapai ribuan (untuk ukuran Provinsi Banten), mengingat sejak tahun 1980-an Universitas Tirtayasa Serang (tatkala masih berstatus sebagai perguruan tinggi swasta) sudah menghasilkan alumni dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, hingga saat ini (setelah menjadi perguruan tinggi negeri) masih tetap menyelenggarakannya. Selain merekrut alumni dari

jurusan Pendidikan Luar Sekolah, bisa pula dipertimbangkan untuk merekrut alumni dari jurusan Bimbingan dan Konseling serta alumni dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Alumni dari jurusan Bimbingan dan Konseling akan memiliki keunggulan dalam melakukan pendekatan edukatif saat proses pembelajaran berlangsung didalam kelas, karena mereka memiliki ilmu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran didalam kelas dengan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan edukatif yang diperkirakan mereka temui di dalam kelas. Sedangkan rekrutmen dari alumni jurusan Pendidikan Agama Islam sangat erat kaitannya dengan **watak khas orang Banten** yang sangat religius, sehingga pendekatan religius yang Islami sangat dibutuhkan pada saat memberikan proses pembelajaran di luar kelas, dan kebutuhan ini sangat mudah ditemui pada sosok alumni dari Jurusan Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun dari berbagai Perguruan Tinggi Agama Islam Swata yang berlokasi di tanah Banten, yang jumlah alumninya diperkirakan sudah mencapai puluhan ribu sarjana.

C. Lembaga Pendidikan Usia Lanjut

Lembaga khusus pendidikan manusia usia lanjut harus sengaja dibuat atau diciptakan dengan jumlah terbatas, minimal satu lembaga pendidikan milik pemerintah dan satu lembaga pendidikan usia lanjut milik masyarakat atau yayasan pendidikan tertentu. Nama lembaganya bisa langsung bernama Lembaga Pendidikan Usia Lanjut (LPUL), karena keberadaanya dibawah koordinasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Kecamatan atau Pusat Pendidikan Kaum Manula (PPKM), karena satu wilayah kecamatan hanya ada satu lembaga pendidikan usia lanjut milik pemerintah dan satu lembaga pendidikan usia lanjut milik masyarakat.

Dalam keadaan darurat, **pemerintah daerah otonomi kabupaten/kota** bisa memanfaatkan kantor lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada pada salah satu desa atau kelurahan untuk dijadikan tempat pelaksanaan proses pendidikan usia lanjut dengan sistem pembelajaran tertentu dan berdasarkan kurikulum pendidikan tertentu pula.

Namun demikian, apabila dipandang perlu oleh sebagian besar masyarakat di tingkat kecamatan. Maka segeralah dibentuk lembaga khusus yang bertugas menyelenggarakan program pendidikan usia lanjut, baik berstatus milik pemerintah maupun milik masyarakat atau keduanya menyelenggarakan program pendidikan yang sama dengan petugas dan penanggungjawab yang berbeda.

D. Kurikulum Pendidikan Usia Lanjut

Mengingat tujuan pendidikan Usia lanjut adalah untuk mewujudkan masa tua yang mampu mengambil keputusan yang terbaik, mampu memenuhi kebutuhan, mampu menghargai orang lain, mampu menghilangkan ketergantungan minimal dengan pihak lain, sehingga hidup sehat, bahagia, produktif, berdaya guna dan terjadinya peningkatan kemandirian serta peran serta warga belajar usia lanjut ditengah-tengah masyarakat dan keluarga khususnya (Ugi Suprayogi, 2007:153).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka bentuk kurikulum yang dirasakan sesuai dengan karakter pendidikan usia lanjut adalah *kurikulum persistent life situation* (kurikulum berdasarkan suasana belajar yang

melekat), sebagaimana telah diusulkan oleh Stratemeyer (1957), Taba (1962), Saylor, Alexander, dan Lewis (1974), serta Zain Robert (1976).

Kurikulum persistent life situation (kurikulum berdasarkan suasana belajar yang melekat) dibangun atas dasar asumsi: Pertama, Pengalaman belajar yang dimiliki usia lanjut; Kedua, Penguasaan varian pengalaman belajar para usia lanjut; dan Ketiga. Materi yang dipelajari merupakan kebutuhan para usia lanjut itu sendiri.

Selanjutnya karakteristik *kurikulum persistent life situation* (kurikulum berdasarkan suasana belajar yang melekat) bagi pendidikan usia lanjut adalah: Pertama, *Universal*, artinya pokok bahasannya memiliki tingkat generalisasi yang tinggi, sehingga mampu memberikan kompetensi seluruh spektrum pendidikan bagi warga belajar usia lanjut; Kedua, *Adaptif*, artinya dapat memberikan kemampuan kepada warga belajar usia lanjut untuk mengadaptasi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Ketiga, *Transferable*, artinya konsep-konsep yang ada dalam pokok-pokok bahasan dapat dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari; Keempat, *Aplikatif*, artinya memungkinkan diaplikasikan secara luas

pada berbagai bidang keilmuan dan teknologi; dan Kelima, *Meaningful*, artinya layak, bermakna dan bermanfaat untuk diketahui dan dikuasai peserta didik.

E. Biaya Pendidikan Usia Lanjut

Mengingat sifatnya *human interest*, maka sedapat mungkin biaya pendidikan pada lembaga pendidikan usia lanjut "dibebaskan" alias "gratis" bagi seluruh peserta didik, tetapi harus tetap diusahakan agar tenaga pengajarnya mendapat honorarium yang wajar menurut ukuran masyarakat sekitar atau menurut ukuran pemerintah daerah otonomi yang bersangkutan. Digratiskannya atau dibebaskannya biaya pendidikan bagi manusia usia lanjut sebagai bentuk nyata dari kepedulian sosial budaya pemerintah daerah maupun pengelola lembaga pendidikan milik masyarakat.

Dalam kondisi tertentu, bisa saja sebagian biaya pendidikan pada lembaga pendidikan usia lanjut dibebankan kepada keluarga dari peserta didik sebagai bentuk "kepedulian atau tanggung jawab" mereka terhadap nasib kakek dan nenek mereka. Harus ditegaskan bahwa tidak ada unsur bisnis yang berkembang, justru pengelola

lembaga pendidikan usia lanjut harus mengembangkan konsep *subsistence*, yakni siap menghasilkan "keuntungan" dengan cara menarik biaya pendidikan ala kadarnya sepanjang untuk memenuhi kebutuhan makan siang dan minuman penyegar dahaga saja.

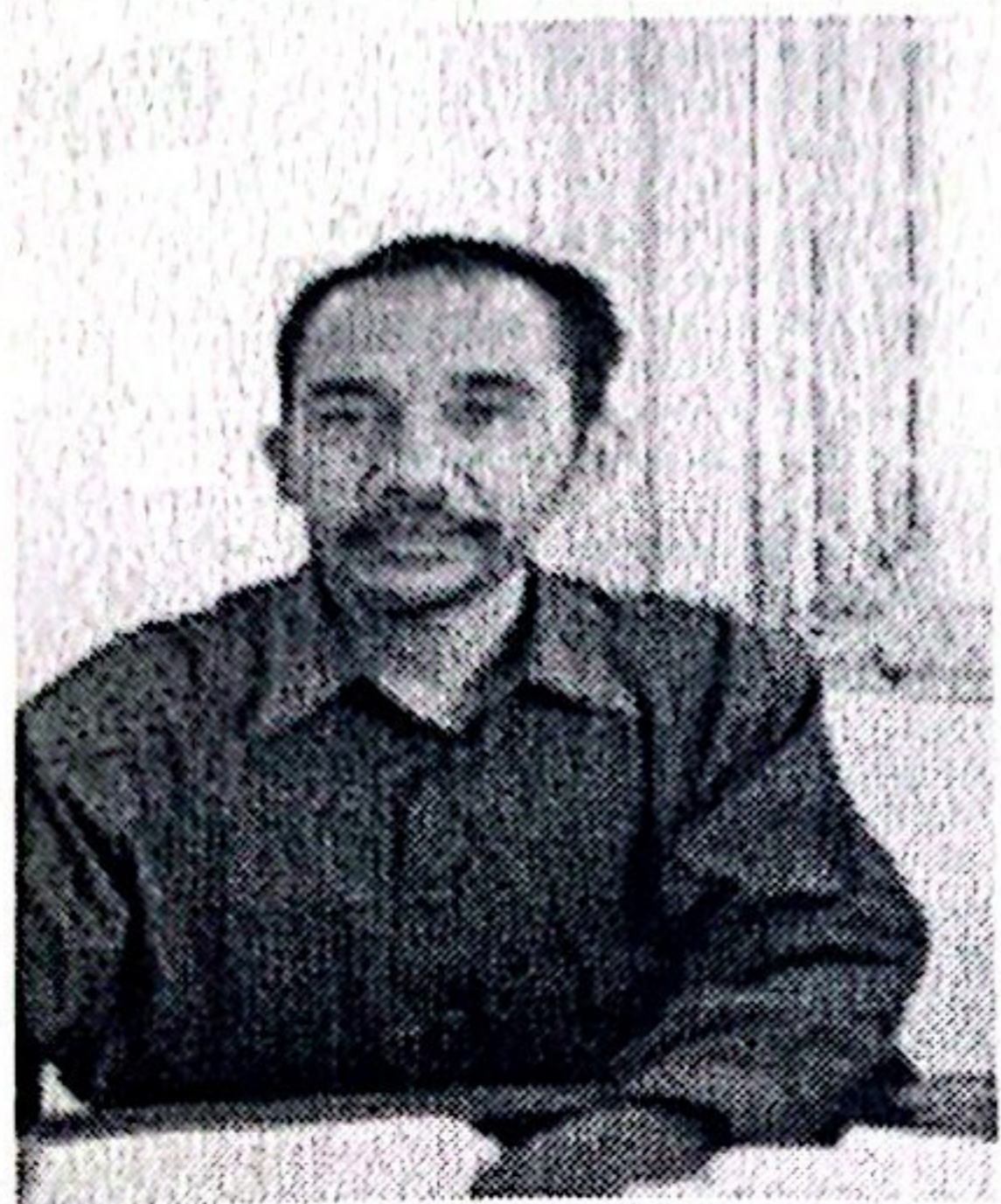
Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: pertama, pemerintah daerah otonomi kabupaten/kota perlu segera memberi pertimbangan untuk mendirikan atau memberikan izin pendirian lembaga pendidikan bagi manusia usia lanjut di setiap kota kecamatan; Kedua, staf pengajar yang layak untuk direkrut dalam rangka pendidikan usia lanjut adalah alumni dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, alumni dari jurusan Bimbingan dan Konseling, serta alumni dari jurusan Pendidikan Agama Islam; Ketiga, kurikulum yang paling cocok dikembangkan pada pendidikan usia lanjut adalah ***kurikulum persistent life situation*** (kurikulum berdasarkan suasana belajar yang melekat).

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Visimedia
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Jakarta: Visimedia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU ASN Nomor 30 tahun 2019
- Ugi Suprayogi, Penelitian Tindakan dalam pendidikan nonformal. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1995 tentang Usia Pensiun Normal dan BUP Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun.

PROFIL PENULIS



Penulis lahir di Serang pada tanggal 28 Oktober 1967. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Inpres Delingseng Ciwandan Cilegon (lulus tahun 1980). Melanjutkan studi ke SMP Negeri 1 Kota Serang (lulus tahun 1983). Melanjutkan studi ke SMA Negeri 1 Kota Serang (lulus tahun 1986). Melanjutkan studi S-1 pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Jurusan Pendidikan Geografi (lulus tahun 1991). Melanjutkan studi S-2 pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (lulus tahun 2002). Melanjutkan studi S-3 pada Program Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung dalam bidang Ilmu Pendidikan Konsentrasi Manajemen Pendidikan (lulus tahun 2012).

Penulis pernah mengajar IPS-Geografi di MAN 2 Kota Serang (1991-1994), SMA Negeri Ciruas - Serang (1991), SMA Negeri Pabuaran Serang (1991), SMA Negeri 2

Krakatau Steel Cilegon (1994-1998), SMA PGRI 1 Kota Serang (1991-1998), Bimbingan Belajar Nurul Fikri Serang (1998-2008), SMP Negeri 5 Kota Serang (1998-2002), Dosen IAIB Serang (1993-2003), Dosen STKIP Situs Banten (2000- sekarang).

Karya tulis dalam bentuk buku: Menyimak Fenomena Pendidikan di Banten, Penerbit Diadit Media, Jakarta (2005). Menggagas Jurnalistik Pendidikan, Penerbit Diadit Media, Jakarta (2007). Pembelajaran Mikro, Penerbit Diadit Media, Jakarta (2009). Manajemen Peningkatan Profesionalisme Dosen, Penerbit FTK Banten Press, Serang (2013). Pengantar Metodologi Studi Islam, Penerbit FTK Banten Press, Serang (2015). Kolaborasi Guru dan Dosen, Penerbit FTK Banten Press, Serang (2016). Pendidikan Dalam Perspektif Global (Proses Cetak, 2019).

Sekarang penulis bekerja sebagai Dosen Manajemen Pendidikan Islam (S-1 dan S-2) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan tugas tambahan sebagai Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S-2) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Email: Jantera_Anis@yahoo.com.

Tiada hari tanpa menulis, maka marilah menulis selagi bisa untuk menulis. Jadikanlah menulis merupakan kebutuhan bagi kita semua pihak. Buku ini adalah buku keempat yang sebelumnya buku ketiga berjudul "Perspektif Pendidikan Indonesia di Era Globalisasi". Buku keempat ini terdiri dari artikel, makalah, opini, hasil penelitian, dan lain-lain yang di tulis oleh 15 orang yang terdiri dari guru, dosen, praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, pegiat literasi, konsultan pendidikan, pengawas pendidikan dan mahasiswa yang tergabung dalam komunitas pencinta buku dari grup whatsapp, yang akan terus berkiprah berkarya dalam menghasilkan buku yang bermanfaat dengan tema-tema yang sesuai dengan perkembangan zaman hingga sekarang ini. Artikel, makalah, hasil penelitian dalam buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami dengan alur pikir yang memuat pengalaman dan menambah wawasan serta khazanah dunia pendidikan, sehingga buku ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak dalam dunia pendidikan. Buku ini pun dapat dijadikan bahan masukan untuk semua pihak termasuk pemerintah dalam pengambilan keputusan dan sebagai solusi yang disampaikan. Esensi pendidikan adalah pembentukan karakter, seluruh sentra pendidikan harus memilikinya. Buku ini mencoba mengeksplorasi isu dan wawasan terkait pendidikan agama dan karakter sebagai pondasi akhlak yang saat ini menjadi trend bagi proses pengembangan pendidikan, solusi yang disampaikan dalam buku ini dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia.



087871944890



Indonesiamediaedukasi@gmail.com



Jalan Lingkar Caringin RT 05/05
Caringin Cisoka Kabupaten Tangerang Banten

ISBN 978-623-7463-47-4

